



# POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH

*Narasi Pencerahan Islam untuk  
Indonesia Berkemajuan*

Prolog:

**Dr. H. Haedar Nashir, M.Si**  
**Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P**

Editors:

**Ridho Al-Hamdi**  
**David Efendi**  
**Bachtiar Dwi Kurniawan**  
**Hilman Latief**



## **BAB 2 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KESEJAHTERAAN: BEST PRACTICES DI BIDANG PEMBERDAYAAN, LINGKUNGAN, FILANTROPI, DAN KEBENCANAAN**

- Muhammadiyah dan Keberdayaan Kaum Rentan ~ Ahmad Ma'ruf – 65
- Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ~ Hempri Suyatna – 72
- Transformasi Spirit Al-Maun dalam Tiga Gerakan Dakwah bagi Pekerja Migran Indonesia di Taiwan ~ Andi Azhar – 78
- Etika Hijau Muhammadiyah ~ David Efendi – 85
- Penyelamatan Lingkungan sebagai Jihad Muhammadiyah di Abad Kedua ~ Rijal Ramdani – 90
- Respon Muhammadiyah atas Persoalan Lingkungan ~ David Efendi – 101
- Gerakan Sosial-Ekologi Muhammadiyah ~ David Efendi – 108
- Muhammadiyah, Filantropi, dan Lingkungan Hidup ~ Masmulyadi – 114
- MDMC: Meneguhkan Peran Kemanusiaan dan Kebencanaan Muhammadiyah ~ Rahmawati Husein – 120
- Sekolah Muhammadiyah Aman Bencana ~ Arif Jamali Muis – 126

## **BAB 3 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KEBANGSAAN YANG BERADAB**

- Muhammadiyah, Pancasila, dan Ideologi Negara-Bangsa ~ Bachtiar Dwi Kurniawan – 133
- Memperkuat Pilar Keadilan untuk Indonesia Berkeadaban ~ Irvan Mawardi – 137
- Beragama yang Mencerahkan: Implementasi Kerja Kemanusiaan Relawan Muhammadiyah ~ Arif Jamali Muis – 144
- Sekolah Politik Muhammadiyah: Upaya Menambal Defisit Kader Politik Intelektual ~ Roni Tabroni – 148
- Menggagas Sekolah Politik Indonesia Berkemajuan: Strategi Politik Non-Praktis Muhammadiyah dalam Kompetisi Elektoral ~ Suswanta – 153

- Mewujudkan Ma... – 158
- Muhammadiyah, Dwi Kurniawan –
- Visi Nasionalisme Darmawan – 169
- Mengawal Politik
- Politik Muhamma... – 181
- Muhammadiyah, Riza Ul Haq – 189
- Islam dan Politik K

## **BAB 4 MUHAMMA**

- Eksperimentasi M... Keharusan ~ Tunju
- Peran Strategis Mu
- Politik yang Mence... Husni Amriyanto P
- Muhammadiyah d... Inklusif Muhamma
- Netral-Aktif: Sikap E... M. Taufiq AR – 223
- Dilema Netralitas S... – 228
- Meninjau Ulang Pe... Irvan Mawardi – 23

## **BAB 5 MUHAMMAD**

- Narasi dan Teologi P
- Muhammadiyah Sel... Moh Zaki Arrobi – 2
- Gerakan Perdamaian... ~ Ridho Al-Hamdi –

## **TENTANG EDITORS**

# MENGGAGAS SEKOLAH POLITIK INDONESIA BERKEMAJUAN: STRATEGI POLITIK NON-PRAKTIS MUHAMMADIYAH DALAM KOMPETISI ELEKTORAL

Suswanta

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Salah satu masalah penting yang masih menjadi pekerjaan rumah Muhammadiyah sampai hari ini adalah kegagalan dalam mengukung kandidatnya dalam kompetisi elektoral di era reformasi, khususnya pemilihan presiden secara langsung (Solikhin, 2018). Muhammadiyah berkepentingan dengan kompetisi elektoral karena “K.H. Ahmad Dahlan menginginkan ada pikiran-pikiran Muhammadiyah yang dituntun oleh Universitas Muhammadiyah, tapi diamankan melalui regulasi oleh para pejabat publik. Inilah pentingnya aktivis Muhammadiyah menjadi pejabat publik. Ini adalah fatwa pedagogis dari K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah tidak hanya sekadar merawat akal sehat melalui glorifikasi retorik, tapi Muhammadiyah secara mendasar mendirikan infra struktur akal sehat dengan pendirian sekolah dan perguruan tinggi. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki 176 universitas di seluruh Indonesia. Kalau satu universitas rata-rata memiliki 7.000 mahasiswa, maka dalam lima tahun jumlahnya sama dengan 20 daerah pemilihan” (Gerung, 2019).

Pernyataan Rocky Gerung tersebut menjadi provokasi positif dalam menyadarkan potensi besar sekaligus peran politik kontributif yang seharusnya dimainkan Muhammadiyah terkait kompetisi elektoral. Tulisan ini dimaksudkan untuk menambah bobot provokasi agar Muhammadiyah segera merumuskan strategi jitu dalam kompetisi elektoral sesuai dengan jati dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar modernis terbesar di Indonesia yang memiliki khittah politiksekaligus

menterjemahkan bentuk netralitas politik atau politik adiluhung (*high politics*). Asumsi tulisan ini adalah dengan potensi kader dan infrastruktur pendidikan yang dimilikinya, Muhammadiyah berpeluang besar melahirkan pejabat publik yang akan mampu membangun tatanan politik yang baik.

### **Netralitas Politik: Antara Idealita dan Realita**

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sudah memiliki posisi dan sikap politik yang jelas dalam kompetisi elektoral, yaitu netral, dalam arti tidak berafiliasi dengan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Mengacu pada pemilihan presiden 2014, keputusan bersikap netral tertuang dalam Maklumat Kebangsaan Menghadapi Pemilihan Presiden 2014 yang dikeluarkan Muhammadiyah pada Tanwir di Samarinda, 23-25 Mei 2014. Dalam maklumat tersebut, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih capres/cawapres yang memenuhi tujuh kriteria, yaitu: religius, negarawan, *decisive*, mampu mengelola negara dengan baik, mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan negara, *strategic* dan *committed* (Solikhin, 2018).

Muhammadiyah memang tidak pernah berubah menjadi partai politik, tetapi tidak berarti steril politik. Merujuk pada perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak mungkin menghindarkan diri dari arena politik. Ada dua pandangan terkait sikap netral Muhammadiyah dalam kompetisi elektoral. *Pertama*, Muhammadiyah menempatkan semua partai politik yang mengusung capres/cawapres sama, dalam arti menjaga jarak dengan semua partai, capres/cawapres dan tidak memiliki hubungan langsung. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat menjadi penentu suara umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar. *Kedua*, politik tinggi Muhammadiyah adalah politik kebangsaan melalui perilaku politik santun beretika dan bukan dukung mendukung pasangan capres/cawapres (Qodir, 2010).

Jika Pimpinan Pusat mampu menjaga Muhammadiyah secara organisasi netral dan jauh dari politik kekuasaan dalam kompetisi elektoral, akan tetapi tidak demikian dengan Pimpinan Daerah atau Wilayah Muhammadiyah. Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Sleman dan Maros menunjukkan hal yang berbeda. Beberapa daerah tersebut mencoba memadukan *high politics* dan *low politics*. Amien Rais menjelaskan bahwa *high politics* adalah politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis. Sedangkan *low politics* adalah politik tingkat rendah yang berorientasi praktis atau meminta jabatan (Kuntowijoyo, 1995). Sikap Muhammadiyah yang sejalan dengan *high politics* dapat

diartikan tidak  
kegiatan-kegia  
keterbukaan,  
politik untuk  
*vested interes*

Jarak terri  
politik Muha  
elektoral. Kes  
berkaitan den  
dan perlu din  
jarak teritorial  
politik menjad  
perubahan fil  
sama dengan  
sama dengan s  
pola hubunga  
Dukungan Pim  
terhadap sala  
2019, dan duk  
terhadap sala  
dan 2015 mer  
dari kekuasaan

### **Arti Penting**

Perbedaan  
dalam perebut  
*high politics* d  
*civil society* m  
memiliki kapab  
usianya yang  
format yang j  
dengan kepen  
memerlukan se  
dunia politik da  
Muhammadiya  
sosial politik y  
politik jitu non  
mendirikan sek

diartikan tidak terlibat dalam politik praktis, namun dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti memerangi korupsi, menegakkan keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, tidak meminta jabatan, melakukan manuver politik untuk memperebutkan kursi, membuat tekanan, dan memperluas *vested interest*. (Kuntowijoyo, 1995).

Jarak teritorial dan politik menjadi faktor penjelas perbedaan ijhtihad politik Muhammadiyah di level nasional dan lokal dalam kompetisi elektoral. Keseharian Muhammadiyah di level lokal memiliki urusan berkaitan dengan pemerintahan, di mana segala keputusan politik dapat dan perlu dinegosiasikan. Hal ini berbeda dengan level nasional, di mana jarak teritorial dan politik yang tidak terjangkau mengakibatkan orientasi politik menjadi kurang penting di level pusat Muhammadiyah. Selain jarak, perubahan filosofi berpolitik Muhammadiyah dari “menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik” menjadi “menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik” memiliki dampak serius bagi dinamika pola hubungan Muhammadiyah dan politik di daerah-daerah tertentu. Dukungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap salah satu calon DPD RI tertentu pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019, dan dukungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Sleman terhadap salah satu calon bupati/wakil bupati tertentu pada pilkada 2010 dan 2015 menunjukkan fenomena elit untuk mendapatkan representasi dari kekuasaan politik formal.

### **Arti Penting Sekolah Politik Indonesia Berkemajuan**

Perbedaan pendapat tentang terjunnya kader Muhammadiyah dalam perebutan kekuasaan tidak serta merta berkonotasi negatif. Peran *high politics* dapat diartikan bahwa Muhammadiyah sebagai bagian dari *civil society* menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan kepribadian Muhammadiyah. Dalam usianya yang satu abad, sudah selayaknya Muhammadiyah memiliki format yang jelas bagaimana mengartikulasikan politik yang aspiratif dengan kepentingan persyarikatan. Oleh karena itu, Muhammadiyah memerlukan sebuah konstruksi bagaimana membangun relasinya dengan dunia politik dan kenegaraan pada umumnya sehingga di masa mendatang Muhammadiyah tidak lagi terbata-bata saat mengeja kompleksitas alfabeta sosial politik yang mengitarinya (Solikhin, 2018). Salah satu strategi politik jitu non-praktis Muhammadiyah dalam kompetisi elektoral adalah mendirikan sekolah politik Indonesia berkemajuan.

Muhammadiyah telah memiliki semua piranti yang memungkinkan lahirnya politisi negarawan dengan kapabilitas dan kapasitas maupun serta berkepribadian Muhammadiyah melalui sekolah politik Indonesia berkemajuan, yaitu materi (kurikulum), guru (pembina), fasilitas, dan jejaring. Materi awal dalam sekolah ini akan menajamkan fokus pada bagaimana meraih kemenangan dalam kompetisi elektoral, yaitu: *leadership, personal branding, managing relation, emotional, and spiritual quotient for legislators*. Strategi pemenangan, pendalaman regulasi terkait, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Adapun materi lanjutan, tergantung peruntukannya, untuk calon anggota legislatif dapat diajarkan bagaimana menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan serta pendalaman regulasi terkait. Sedangkan untuk eksekutif, materi yang diajarkan adalah tentang bagaimana mengelola negara di era global, baik terkait urusan di dalam maupun luar negeri, aspek-aspek apa yang harus mendapat perhatian agar rakyat yang berhimpun di dalamnya mendapatkan haknya, yaitu keamanan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lain secara manusiawi. Pendekatan penyampaian materi dapat dilakukan melalui teori dan praktik dengan mengundang narasumber yang berkompeten dan berpengalaman.

Untuk peserta dapat dibuat syarat-syarat khusus dan diperuntukkan untuk semua kader Muhammadiyah yang akan maju dalam kompetisi elektoral, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional sebagai calon legislator (DPRD dan DPR), senator (DPD) atau calon bupati, walikota, gubernur atau presiden. Keberhasilan sekolah politik Indonesia berkemajuan ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak terkait. Optimalisasi fungsi semua Majelis dan Lembaga serta Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan mampu membuat Muhammadiyah tidak hanya akan melahirkan pejabat publik handal yang berkepribadian Muhammadiyah, tetapi juga mampu menjadikan Muhammadiyah sebagai juru bicara bagi aspirasi politik rakyat dan aspirasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta dampak pembangunan terhadap kualitas hidup rakyat. Pada akhirnya, kiprah dakwah Muhammadiyah akan semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam mendorong kemajuan untuk terwujudnya peradaban utama. Apakah hal ini akan terlaksana? Tentu tidak jika hanya menjadi wacana semata.

## Daftar Pustaka

- Alif, ZTF, Pradana. 2009. *Pa Progresif di Tubuh M*
- Hartowijoyo, dkk. *Intelekt*  
Bandung : Mizan. 199
- Washir, Haedar. 2008. *Khitt*  
Bigraf Publishing
- Washir, Haedar. 2011. *Mu*  
Muhammadiyah.
- Saikhin, Ahmad, 2018. *Per*  
Antara Pusat dan D  
UTA'45. Jakarta, Vol.
- Qadir, Zuly. 2010. *Muha*  
Pemikiran Memasuki

## Daftar Pustaka

- Boy ZTF, Pradana. 2009. *Para Pembela Islam, Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah*. Jakarta : Gramata.
- Kuntowijoyo, dkk. *Intelektualisme Muhammadiyah Meyongsong Era Baru*. Bandung : Mizan. 1995
- Nashir, Haedar. 2008. *Khittah Muhammadiyah Dalam Politik*. Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Nashir, Haedar. 2011. *Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Solikhin, Ahmad, 2018. Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat dan Daerah. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik Fisip UTA'45*. Jakarta, Vol. 3 No. 2 (September-Februari 2018).
- Qodir, Zuly. 2010. *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.